

ANALISIS KEPENDUDUKAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI

Eka Adiputra

STIE Cendekia Bojonegoro

e-mail: Eka_adiputra@ymail.com

Abstract: Bojonegoro's economic growth within 3 years (2010, 2011, and 2102) is the highest as the province of East Java categorized as Fast Growing Regions (Typology Klassen). This means that the economic growth rate Bojonegoro greater than the achievement of economic growth in East Java province. However, the achievement of the highest economic growth progressively decreased. In this study, researchers tried to analyze the influence of demographic factors on the rate of economic growth. Factors studied population is the total population and the population dependency ratio of the load. Researchers will analyze the influence of the number of population and ratio of load dependence of the rate of population growth is declining. The method used in this research is descriptive analysis.

Keywords : economic growth , typology Klassen , demographic factors.

Abstrak : Pertumbuhan ekonomi kabupaten Bojonegoro dalam kurun waktu 3 tahun (2010, 2011, dan 2102) merupakan yang tertinggi se-provinsi Jawa Timur dikategorikan sebagai Daerah Berkembang Cepat (Tipologi Klassen). Artinya tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bojonegoro lebih besar dibandingkan dengan pencapaian pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur. Namun pencapaian pertumbuhan ekonomi tertinggi tersebut semakin lama semakin mengalami penurunan. Dalam penelitian ini, Peneliti berusaha menganalisis pengaruh faktor-faktor kependudukan terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi. Faktor-faktor kependudukan yang diteliti adalah jumlah penduduk dan rasio beban ketergantungan penduduk. Peneliti akan menganalisis pengaruh dari jumlah penduduk dan rasio beban ketergantungan penduduk terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi yang sedang mengalami penurunan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif.

Kata kunci: pertumbuhan ekonomi, tipologi klassen, faktor-faktor kependudukan

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan suatu daerah. Setiap daerah berusaha untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerahnya

dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai proses kenaikan output/pendapatan perkapita dalam jangka panjang (Boediono, 1982). Mengacu pada pendapatan perkapita, pertumbuhan ekonomi

dipengaruhi oleh dua faktor yang perlu diperhatikan yaitu output total (GDP) dan jumlah penduduk. Maka pertumbuhan ekonomi secara sempit, dapat dianalisis dengan melihat perkembangan dari jumlah output yang dihasilkan dan penambahan jumlah penduduk.

Pertumbuhan ekonomi daerah adalah penambahan pendapatan masyarakat yang terjadi di daerah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (*added value*) yang terjadi di daerah tersebut secara riil. Hal ini menunjukkan balas jasa bagi faktor-faktor produksi yang beroperasi di daerah tersebut (tanah, tenaga kerja, modal, *skill*) yang berarti menggambarkan kemakmuran daerah tersebut. Kemakmuran suatu daerah selain ditentukan oleh nilai tambah dari daerah tersebut juga dipengaruhi oleh seberapa besar *transfer payment*, yaitu bagian pendapatan yang berasal dari luar daerah.

Pertumbuhan ekonomi haruslah bersumber dari proses perekonomian daerah tersebut. Hal ini untuk mengantisipasi jika pertumbuhan ekonomi tersebut tercipta hanya karena banyaknya bantuan atau suntikan dana dari instansi tertentu. Jika bantuan atau

suntikan dana tersebut terhenti, dikhawatirkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut juga akan turut berhenti. Dalam kondisi ekonomi seperti itu, sulit dikatakan bahwa perekonomian daerah tersebut dikatakan mengalami pertumbuhan. Suatu hal yang wajar jika suatu daerah dalam jangka waktu tertentu memperoleh kompensasi dari kegiatan suatu usaha namun diharapkan daerah tersebut tetap mampu tumbuh walaupun tidak memperoleh dana kompensasi.

Sektor ekonomi yang dominan merupakan sektor ekonomi yang menjadi potensi bagi daerah yang bersangkutan. Setelah adanya otonomi daerah, tiap daerah bebas untuk menetapkan sektor unggulan yang menjadi prioritas. Kemampuan pemerintah daerah untuk melihat sektor yang memiliki keunggulan di wilayahnya menjadi hal penting. Sektor unggulan memiliki prospek yang lebih baik untuk dikembangkan dan diharapkan dapat mendorong sektor-sektor lain untuk berkembang (*multifier effect*).

Tabel 1.
Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten/Kota di Jawa Timur
tahun 2010-2011

No.	Kabupaten/Kota	2010	2011	2012
1	Bojonegoro	11,84	9,19	5,68
2	Kota Batu	7,16	8,01	
3	Kota Surabaya	7,47	7,72	
4	Kota Malang	6,60	7,50	
5	Malang	6,57	7,43	
6	Gresik	6,89	7,36	
7	Tuban	6,30	7,24	
8	Tulungagung	6,65	7,24	
9	Banyuwangi	6,26	7,22	
Jawa Timur		6,68	7,22	7,27
10	Kediri	6,07	7,21	
11	Kota madiun	6,97	7,18	
12	Mojokerto	6,87	7,14	
13	Pasuruan	6,23	7,12	
14	Lamongan	6,86	7,08	
15	Sidoarjo	5,92	7,04	
16	Kota Kediri	5,99	7,02	
17	Jember	6,16	7,00	
18	Kota Mojokerto	6,66	6,98	
19	Jombang	6,65	6,93	
20	Pacitan	6,66	6,85	
21	Ngawi	6,19	6,76	
22	Madiun	5,96	6,71	
23	Kota Probolinggo	6,41	6,58	
24	Kota Blitar	6,66	6,57	
25	Trenggalek	6,16	6,55	
26	Blitar	6,12	6,54	
27	Bangkalan	5,47	6,50	
28	Nganjuk	6,32	6,40	
29	Lumajang	5,94	6,29	
30	Sampang	5,40	6,29	
31	Ponorogo	5,89	6,25	
32	Sumenep	5,51	6,24	
33	Probolinggo	6,25	6,23	
34	Situbondo	5,89	6,23	
35	Pamekasan	5,77	6,21	
36	Bondowoso	5,69	6,20	
37	Kota Pasuruan	5,99	6,19	
38	Magetan	5,81	6,14	

Sumber: Musrenbang Provinsi Jawa Timur, 2012.

Kabupaten Bojonegoro memiliki sumber daya alam yang tinggi. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang dapat meningkatkan potensi daerah, salah satunya adalah kayu jati yang dapat diolah menjadi karya seni ukir, meubel, atau kerajinan tangan. Selain itu, sektor yang menjadi tumpuan penerimaan daerah adalah sektor migas. Pengoperasian Blok Migas Banyu Urip akan memberikan dampak bagi perekonomian kabupaten Bojonegoro berupa penciptaan lapangan kerja, kesempatan usaha baru, serta peningkatan pendapatan asli daerah. Penelitian awal menunjukkan bahwa Blok Migas Cepu (Banyu Urip) berdampak pada peningkatan investasi dari kegiatan pembangunan di sektor konstruksi dan pengeboran sebesar 2 miliar dolar AS (selama 3 tahun) dan peningkatan kesempatan kerja sebesar 1.060 orang selama tiga tahun (BI, 2006).

Salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah adalah dengan melihat Produk Domestik Bruto (PDRB). PDRB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah atau nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit

ekonomi (BPS, 2013). Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2009 sebesar 7,27 triliun rupiah, pada tahun 2010 sebesar 8,128 triliun rupiah, dan pada tahun 2011 sebesar 8,875 triliun rupiah. Sedangkan tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bojonegoro tahun 2009 sebesar 10,10% dan mengalami kenaikan pada tahun 2010 menjadi 11,84%. Namun pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan di tahun 2011 menjadi 9,19%. Berdasarkan tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut, terlihat bahwa perkembangan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bojonegoro mengalami fluktuatif.

Tabel 2
PDRB Perkapita dan Tingkat
Pertumbuhan Ekonomi Kota
Bojonegoro dan Provinsi Jawa Timur
Tahun 2009-2011

	PDRB Perkapita			Pertumbuhan Ekonomi		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Bojonegoro	13.940.418	18.343.544	22.69578	10,10%	11,84%	9,19%
Jawa Timur	18.420.936	20.774.589	23.469.314	5,01%	6,68%	7,22%

Sumber: Bojonegoro Dalam Angka, 2012

Gambaran dan pola struktur pertumbuhan masing-masing daerah yang mempresentasikan kesejahteraan penduduknya dapat diketahui dengan

menggunakan tipologi daerah (Tipologi Klassen) yang mendasarkan pada dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan PDRB perkapita daerah (Kuncoro, 2004). Tipologi Klassen mengklasifikasikan empat karakteristik pola dan struktur pertumbuhan ekonomi, yaitu:

1. Daerah cepat maju dan cepat tumbuh
Daerah yang memiliki rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita yang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita provinsi.
2. Daerah maju tetapi tertekan
Daerah yang memiliki rata-rata tingkat pendapatan perkapita lebih tinggi tetapi tingkat pertumbuhan ekonomi lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata pendapatan perkapita dan pertumbuhan ekonomi provinsi.
3. Daerah berkembang cepat
Daerah yang memiliki rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi lebih tinggi tetapi tingkat pendapatan perkapita lebih rendah dibandingkan dengan provinsi.
4. Daerah relatif tertinggal
Daerah yang memiliki rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi dan

pendapatan perkapita yang lebih rendah dibandingkan dengan provinsi.

Data penerimaan PDRB Perkapita dan Tingkat pertumbuhan ekonomi kabupaten Bojonegoro pada tahun 2009, 2010, dan 2011, berdasarkan Tipologi Klassen, menunjukkan bahwa kabupaten Bojonegoro termasuk dalam kategori “Daerah Berkembang Cepat”. Artinya pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi kabupaten Bojonegoro lebih besar dibandingkan dengan pencapaian pertumbuhan ekonomi provinsi Jawa Timur. Dengan akan beroperasinya sumur minyak yang ada, diperkirakan penerimaan PDRB dan pertumbuhan ekonomi di kabupaten Bojonegoro akan semakin meningkat.

Setiap komponen ekonomi yang ada diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di kabupaten Bojonegoro. Salah satu faktor yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi adalah faktor kependudukan (Jhingan, 2000). Faktor-faktor kependudukan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi antara lain pertumbuhan penduduk, jumlah tenaga kerja, dan rasio beban tanggungan penduduk (Sukirno, 2006).

Jumlah penduduk dalam suatu perekonomian berpengaruh penting terhadap pertumbuhan ekonomi. Johnson dan Lee, 1987 melakukan penelitian tentang pengaruh pertumbuhan jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi pada 75 negara berkembang. Hasil penelitian tersebut adalah pertumbuhan penduduk yang tinggi menyebabkan rendahnya pendapatan perkapita sehingga penambahan penduduk yang tinggi dapat berpotensi menurunkan pertumbuhan ekonomi. Maka, penambahan output tersebut haruslah lebih tinggi dari persentase penambahan jumlah penduduk sehingga ada kecenderungan dalam jangka panjang pertumbuhan ekonomi akan tetap berlanjut.

Pertumbuhan penduduk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, namun juga dapat sebagai penghambat bagi pertumbuhan ekonomi. pertumbuhan penduduk di negara maju mampu mendorong pertumbuhan ekonomi karena didukung oleh investasi yang tinggi dan teknologi yang canggih. Namun, pertumbuhan ekonomi yang cepat dapat mendorong timbulnya masalah keterbelakangan dan prospek pembangunan ekonomi menjadi

semakin jauh (Todaro, 2000). Hal ini biasanya terjadi pada negara sedang berkembang. Pertumbuhan penduduk berhubungan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita (Kelley dan Schmidt, 1995).

Jumlah penduduk yang besar akan menghasilkan angkatan kerja yang besar walaupun pertumbuhan penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan efek yang buruk terhadap pertumbuhan ekonomi (Todaro, 2000). Namun demikian, jumlah penduduk tertentu dengan tingkat pendidikan yang tinggi dan memiliki keahlian tertentu akan dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Jumlah penduduk usia produktif yang besar akan mampu meningkatkan jumlah angkatan kerja yang tersedia dan pada akhirnya akan mampu meningkatkan output daerah.

Faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah tingkat tenaga kerja. Pertumbuhan angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang mendorong pertumbuhan ekonomi (Todaro, 2000). Pertumbuhan jumlah penduduk yang terjadi di Kabupaten Bojonegoro diikuti dengan kenaikan jumlah angkatan kerja. Tenaga kerja memberikan dampak positif terhadap

pertumbuhan output (Pancawati, 2000). Hal ini berarti bahwa walaupun jumlah penduduk tiap tahunnya mengalami kenaikan namun hal tersebut diimbangi dengan kenaikan persentase perbandingan antara jumlah penduduk dan jumlah tenaga kerja. Kenaikan jumlah penduduk di Kabupaten Bojonegoro dipandang masih memberikan sisi positif karena diimbangi dengan kenaikan jumlah tenaga kerja yang relatif besar.

Faktor kependudukan terakhir yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi adalah rasio beban tanggungan penduduk. Rasio beban tanggungan penduduk dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar menunjukkan keadaan ekonomi suatu wilayah tergolong wilayah maju atau sedang berkembang. Rasio beban tanggungan penduduk usia muda berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Lee dan Lin, 1994).

Berdasarkan data dari Musrenbang Provinsi Jawa Timur tahun 2012, tingkat pertumbuhan ekonomi kabupaten Bojonegoro merupakan yang tertinggi se-Jawa Timur. Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut menarik untuk diteliti tentang

pengaruhnya terhadap faktor kependudukan. Apa dampak yang ditimbulkan dari tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut terhadap pertumbuhan jumlah penduduk, tingkat tenaga kerja, dan beban tanggungan penduduk.

TUJUAN PENELITIAN

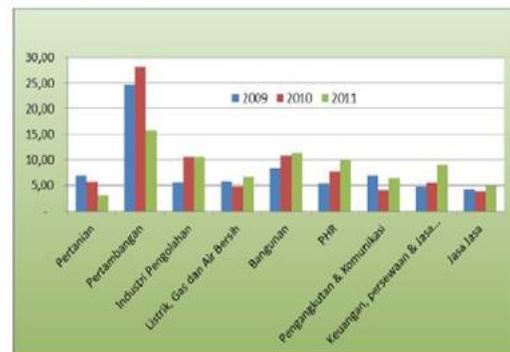
Tipologi Klassen menunjukkan bahwa kabupaten Bojonegoro pada tahun 2009-2011 termasuk dalam “Daerah Berkembang Cepat”. Hal ini karena tingkat pertumbuhan ekonomi kabupaten Bojonegoro lebih besar daripada tingkat pertumbuhan ekonomi provinsi Jawa Timur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari pertumbuhan ekonomi kabupaten Bojonegoro terhadap faktor-faktor kependudukan, dimana faktor-faktor kependudukan terdiri dari pertumbuhan penduduk, jumlah tenaga kerja, dan rasio beban tanggungan penduduk.

PEMBAHASAN

Tingkat pertumbuhan ekonomi dapat digunakan sebagai salah satu tolok ukur dari keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Secara umum, apabila tingkat pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan maka dapat dikatakan program pembangunan

wilayah tersebut berhasil. Namun apabila tingkat pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan maka kinerja perekonomian daerah tersebut dikatakan kurang berhasil.

Tabel 3
Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Bojonegoro Tahun 2009-2011



Sumber: Bojonegoro Dalam Angka, 2012

Pertumbuhan ekonomi kabupaten Bojonegoro mengalami penurunan pada tahun 2011. Faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan tersebut dapat dianalisis dari sektor-sektor lapangan usaha yang membentuk nilai pertumbuhan ekonomi. Sektor-sektor unggulan dari kabupaten Bojonegoro antara lain Pertanian dan Pertambangan. Sektor pertanian yang berkontribusi sekitar 5% terhadap PDRB terus mengalami penurunan pada setiap tahunnya, dan penurunan terbesarnya terjadi pada tahun 2011. Selain itu, sektor unggulan utama, Pertambangan, mengalami penurunan yang cukup

drastis pada tahun 2011. Penurunan pada sektor Pertambangan inilah yang menyebabkan penurunan dari tingkat pertumbuhan ekonomi kabupaten Bojonegoro. Mengingat bahwa kontribusi penerimaan dari sektor Pertambangan sebesar hampir 30% terhadap PDRB sehingga perubahan dari penerimaan sektor Pertambangan akan berdampak besar terhadap penerimaan PDRB.

Penurunan dari sektor Pertanian disebabkan oleh alih fungsi lahan. Data menunjukkan bahwa penurunan dari sektor Pertanian tersebut diiringi oleh kenaikan pada sektor Bangunan. Artinya bahwa lahan pertanian tersebut banyak dialihfungsikan menjadi lahan pemukiman dan lain sebagainya. Sektor Bangunan merupakan kontributor terbesar kedua setelah sektor Pertambangan terhadap PDRB. Penurunan pada sektor Pertambangan pada tahun 2011 yang drastis langsung berdampak pada penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi. Kenaikan pada sektor-sektor lain tidak cukup mampu untuk menutupi besarnya penurunan dari kedua sektor unggulan tersebut. Sektor-sektor yang mengalami kenaikan antara lain sektor Listrik, Gas, dan Air bersih; sektor Bangunan; sektor

Perdagangan, Hotel, dan Restoran; sektor Pengangkutan dan Komunikasi; sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa; dan Jasa-Jasa. Dengan menganalisis data dari Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha tersebut terlihat bahwa kabupaten Bojonegoro sangat tergantung dari penerimaan sektor Pertambangan.

Pertumbuhan Jumlah Penduduk

Penelitian-penelitian yang telah dilakukan selama ini sebagian besar menganalisis pengaruh dari pertumbuhan jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Namun dalam analisis, peneliti ingin menganalisis pengaruh dari tingginya tingkat pertumbuhan jumlah penduduk terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bojonegoro.

Tabel 4
Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk, dan Laju Pertumbuhan penduduk

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi	Jumlah Penduduk	Pertumbuhan Penduduk
2009	10,10%	1.206.506	
2010	11,84%	1.210.527	0,33%
2011	9,19%	1.216.781	0,52%

Sumber: Bojonegoro Dalam Angka, 2012

Berdasarkan tabel 3 diatas, jumlah penduduk kabupaten Bojonegoro meningkat tiap tahunnya dengan laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2010 sebesar 0,33% dan tahun 2011 sebesar 0,52%. Kenaikan laju pertumbuhan penduduk tersebut berbanding terbalik dengan tingkat pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi kabupaten Bojonegoro pada tahun 2010 sebesar 11,84% dan mengalami penurunan pada tahun 2011 menjadi 9,19%. Namun, tingkat pertumbuhan ekonomi selama dua tahun tersebut masih merupakan yang tertinggi di Jawa Timur.

Walaupun tingkat pertumbuhan ekonomi kabupaten Bojonegoro menjadi yang tertinggi di Jawa Timur, tetapi apabila dikaitkan dengan laju pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi tersebut belum menunjukkan sustainabilitas yang aman untuk jangka panjang. Berdasarkan kesimpulan dari Johnson dan Lee, (1996) bahwa laju pertumbuhan ekonomi seharusnya lebih besar daripada laju pertumbuhan penduduknya. Data tentang pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk kabupaten Bojonegoro menunjukkan bahwa terjadi penurunan pada pertumbuhan ekonomi,

namun laju pertumbuhan penduduknya malah mengalami kenaikan.

Tabel 5
Penduduk Berdasarkan Status Kewarganegaraan dan Penduduk 5 Tahun Keatas Berdasarkan Status Migrasi

Nama Kecamatan	Status Kewarganegaraan			Status Migrasi		
	WNI	WNA	Tidak Ditanyakan	Non Migran	Migran	Tidak Ditanyakan
Margomulyo	21.971			19.954	314	
Nigrah	41.439	15		37.891	388	
Tembakrejo	51.360	2		47.261	398	
Ngambon	10.977			10.153	80	
Selar	25.749			23.833	200	
Bubulan	13.654		1	12.649	97	
Gondang	23.799			22.076	167	
Temayang	33.768		120	31.039	582	120
Sugihwaras	42.875			39.589	290	
Kedungadem	76.788			71.306	423	
Kepoh Baru	59.759			53.445	2.016	
Baureno	79.699		2	66.599	1.549	
Kloro	59.806			49.368	532	
Sumberrejo	65.988			60.688	599	674
Balen	61.700		677	56.788	443	
Sukosewu	39.562		24	36.076	784	
Kapas	49.973		1.125	45.493	589	
Bojonegoro	81.883			73.031	2.689	1.099
Trucuk	35.636	2		32.716	246	
Dander	74.851		1.256	68.512	697	1.235
Ngasem	71.190	1		65.838	401	
Kalidu	60.880			55.766	589	
Melo	28.390			26.011	249	
Purwasari	27.050	1		24.652	257	
Padangan	40.220			36.016	945	
Kadiman	28.226			25.813	371	
Kedewan	11.541			10.334	300	
Jumlah	1.206.747	21	2.205	1.102.897	16.095	3.155

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro Diolah, 2013 (Sensus Penduduk 2010)

Tingginya laju pertumbuhan jumlah penduduk di kabupaten Bojonegoro dapat disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya adanya para pendatang yang tinggal di kabupaten Bojonegoro. Hasil Sensus Penduduk tahun 2010, berdasarkan status kewarganegaraan, persentase jumlah penduduk yang tercatat sebagai Warga Negara Indonesia sebesar 99,73% dan persentase jumlah Warga Negara Asing dan penduduk yang tidak ditanyakan sebesar 0,27% pada tahun

2010. Diperkirakan dengan berproduksinya sektor Pertambangan dan meningkatnya perekonomian, persentase jumlah Warga Negara Asing dan penduduk yang tidak ditanyakan akan semakin bertambah. Berdasarkan pada status migran, persentase penduduk migran dan penduduk tidak ditanyakan di kabupaten Bojonegoro sebesar 1,72% atau sebesar 19.250 jiwa.

Rasio Beban Ketergantungan Penduduk

Rasio beban ketergantungan penduduk (*depend ratio*) merupakan perbandingan antara penduduk usia non-produktif (usia 0-14 dan usia >65) dengan penduduk usia produktif (usia 15-64) (mantra, 2000). Rasio tersebut menunjukkan bahwa setiap 100 orang harus menanggung sekian jumlah penduduk dalam suatu wilayah. Semakin rendah nilai rasio beban ketergantungan, maka semakin baik beban tanggungan penduduk.

Penduduk muda berusia dibawah 15 tahun pada umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk yang berusia diatas 65 tahun juga dianggap tidak produktif karena

telah melewati masa pension. Penduduk usia 15-64 adalah penduduk usia kerja yang dianggap masa produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Secara lebih sederhana rasio beban tanggungan penduduk ini dapat memberikan gambaran ekonomis tentang kependudukan dari sisi demografi.

Rasio beban tanggungan penduduk dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu wilayah tergolong wilayah maju atau sedang berkembang. Menurut Sriyana, (2008), peningkatan rasio beban tanggungan penduduk salah satunya disebabkan oleh meningkatnya jumlah kelahiran. Peningkatan fertilitas akan mengakibatkan peningkatan penduduk usia muda yang belum produktif. Penduduk usia produktif akan mengalokasikan pengeluarannya kepada penduduk usia tidak produktif yang seharusnya digunakan untuk investasi sehingga dikhawatirkan akan menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Faktor lain yang menyebabkan peningkatan rasio beban tanggungan

penduduk adalah percepatan pertumbuhan penduduk usia tua yang disebabkan oleh kenaikan angka harapan hidup. Peningkatan penduduk usia tua yang tidak produktif akan meningkatkan pengeluaran pemerintah untuk pensiun dan kesehatan sehingga pengeluaran pemerintah pada sektor lain seperti sektor investasi akan mengalami penurunan. Penurunan pengeluaran pemerintah untuk investasi dapat mengakibatkan penurunan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan penduduk usia tua yang tidak produktif juga mengakibatkan turunnya penawaran tenaga kerja. Dengan asumsi tingkat produktifitas konstan, penurunan jumlah input akan menurunkan output yang dihasilkan. Dengan kata lain, perubahan penduduk menua akan berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Tabel 6
Jumlah Penduduk Menurut
Golongan Umur di Kabupaten
Bojonegoro Tahun 2011

Kelompok Umum	Tahun 2011	Kelompok Umum	Tahun 2010
0-5	79.986	0-4	87.826
6-10	100.966	5-9	93.745
11-16	131.526	10-14	100.728
17	21.936	15-19	89.793
18	21.198	20-24	79.628
19-25	160.668	25-29	96.140
26-30	132.373	30-34	96.421
31-35	130.027	35-39	98.051
36-40	121.695	40-44	100.116
41-45	112.609	45-49	92.500
46-50	104.604	50-54	77.911
51-55	89.883	55-59	59.021
56-59	53.963	60-64	41.654
>60	168.879	65-69	34.587
Jumlah	1.430.313	70-74	27.861
		75-79	18.330
		80-84	10.129
		85-89	3.992
		90-94	1.013
		> 95	527
		Jumlah	1.209.973

Sumber: 1. Sensus Penduduk Tahun 2010, BPS Kab. Bojonegoro
Bojonegoro Dalam Angka, 2012

Rasio beban tanggungan penduduk di kabupaten Bojonegoro menggunakan dua data, yaitu data dari Sensus Penduduk tahun 2010 dan Bojonegoro Dalam Angka 2012. Berdasarkan data dari sensus penduduk tahun 2010, rasio beban tanggungan penduduk pada tahun 2010 sebesar 45,56. Artinya bahwa setiap 100 orang usia produktif terdapat sekitar 46 orang usia tidak produktif, yang menunjukkan banyaknya beban tanggungan penduduk suatu wilayah. Sedangkan rasio beban tanggungan penduduk tahun 2011

berdasarkan Bojonegoro Dalam Angka Tahun 2012 sebesar 32,37. Artinya bahwa setiap 100 orang usia produktif terdapat sekitar 32 orang usia tidak produktif. Perbedaan rasio antara kedua tahun tersebut tergolong tinggi karena berasal dari dua data yang berbeda, yaitu dari Sensus Penduduk dan data dari BPS, sehingga kevalidan perbandingan antar periode tersebut kurang valid. Namun, dengan sedikit mengabaikan asal data diperoleh, nilai rasio beban tanggungan penduduk pada tahun 2011 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2010.

Tabel 7
Rasio Beban Tanggungan Penduduk
di Kabupaten Bojonegoro Tahun
2010-2011

	Non- Produktif	Produktif	Depend Ratio
2010	378.738	831.235	45,56
2011	349.831	1.080.482	32,37

Sumber: Sensus Penduduk 2010, Diolah Bojonegoro Dalam Angka 2012, Diolah

Persentase penduduk usia non-produktif dibawah 15 tahun pada tahun 2010 ternyata lebih besar daripada penduduk usia non-produktif diatas 60 tahun (Sensus Penduduk, 2010). Penduduk usia non-produktif dibawah 15 tahun sebanyak 23,33%

dibandingkan dengan penduduk non-produktif diatas 65 tahun sebanyak 7,97%. Artinya bahwa proporsi untuk penduduk usia produktif pada tahun berikutnya akan semakin besar. Untuk penduduk usia non-produktif dibawah 15 tahun pada tahun 2011 hanya sebesar 12,65%, turun dibandingkan dengan tahun 2010 sehingga seperti yang terlihat pada tabel 6 bahwa *Depend Ratio* pada tahun 2011 menurun dibandingkan tahun 2010.

Jumlah penduduk usia non-produktif dibawah 11 tahun pada tahun 2011 sebesar 180.952 jiwa atau sekitar 12,65% (Bojonegoro Dalam Angka, 2012). Penduduk golongan usia tersebut lebih besar dibandingkan dengan golongan penduduk usia non-produktif diatas 65 tahun. Hal ini artinya bahwa diperkirakan *Depend Ratio* akan meningkat pada tahun berikutnya karena meningkatkan penduduk usia produktif yang disebabkan oleh penduduk usia non-produktif dibawah 11 tahun yang telah memasuki usia produktif.

Penduduk usia produktif di tahun 2012 diperkirakan akan mengalami kenaikan. Pengaruh yang ditimbulkan dari kenaikan tersebut diperkirakan menyebabkan kenaikan pertumbuhan

ekonomi. Meskipun tingkat pertumbuhan ekonomi di kabupaten Bojonegoro lebih banyak dipengaruhi oleh sektor pertambangan. Namun demikian, penambahan penduduk usia produktif diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang disebabkan oleh kontribusi dari sektor-sektor lain selain sektor Pertambangan. Pada akhirnya, sumber penerimaan kabupaten Bojonegoro tidak hanya tergantung pada penerimaan sektor Pertambangan tetapi ada sektor-sektor lain yang masih dapat diandalkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2012. *Bojonegoro Dalam Angka 2013*. BAPPEKAB Bojonegoro.
- , 2012. *Data Sensus Penduduk Tahun 2010*.
- Badan Pusat Statistik. 2013. *Bojonegoro Dalam Angka 2013*. BAPPEKAB Bojonegoro.
- Bank Indonesia. 2006. *Evaluasi Perkembangan Ekonomi, Perbankan, dan Sistem Pembayaran di Jawa Timur Triwulan II-2005*. Diakses Melalui www.bi.go.id Tanggal 5 Februari 2013.
- Boediono. 1982. *Ekonomi Makro*. Edisi 2. Yogyakarta: BPFE.
- Johnson, D.G. dan Ronald Lee. 1987. *Population Growth and Economic Development Issues and Evidences*. Madison, WI: University of Wisconsin, USA.
- Kelley, Allen C. dan Robert M. Schmidt. 1995. *Aggregate Population and Economic Growth Correlations: The Role of The Components of Demographic Change*. Diakses Melalui www.google.com Tanggal 10 Februari 2013.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Lee, Bun S. dan Shuanglin Lin. 1994. *Government Size, Demographic Change and Economic Growth*. Diakses melalui www.google.com Tanggal 15 Agustus 2013
- Soekarwo. 2012. *Prioritas RKPD Provinsi Jawa Timur 2013*. Diakses melalui www.google.com Tanggal 1 September 2013
- Sriyana, Jaka. 2008. *Dampak Transisi Demografi Terhadap Defisit Fiskal di Indonesia*. Diakses Melalui www.google.com Tanggal 15 Agustus 2013
- Sukirno, Sadono. 2006. *Ekonomi Pembangunan Proses Masalah dan Dasar Kebijakan*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Penerbit Kencana
- Todaro, Michael P. 2000. *Pembangunan Ekonomi*. Edisi Terjemahan. Jakarta: Bumi Aksara.